

10 | Ekonomi&Bisnis

Pameran Ketenagalistrikan



Konferensi dan pameran sektor ketenagalistrikan terbesar di Asia Tenggara, Electricity Connect 2024, berlangsung di Jakarta Convention Center, di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Pameran mengaitkan tema *Beyond Power, Envisioning The Future*. Selain menampilkan teknologi mutakhir di sektor ketenagalistrikan, kegiatan tersebut juga menjadi forum kelaborasi global untuk mempercepat pengunaan energi baru terbarukan dan mencapai target *net zero emissions* (NZE) pada 2060.

ASET NEGARA

BPI Danantara Paparkan Strategi Sinergi BUMN

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Daya Arta Nusantara atau BPI Danantara bertemu direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara di Meeting, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang aetnya diumumkan di kantor BPI Danantara.

BPI Danantara telah bertemu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Selasa (19/11). Adapun direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diterima Jumat pekan lalu.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir di kantor BPI Danantara pada Rabu siang. Kepala BPI Danantara Mulyana Darmayana bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero).

Adapun Kamis depan, BPI Danantara dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merujuk data media presentasi, pada tahap awal, BPI Danantara akan mengunjungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharudin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci utama yang perlu di-

wujudkan, yaitu sinergi. "Terdapat sinergi antara BUMN yang optimal, yaitu Allah bisa luar biasa ke depan," ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN mempunyai baik sinergi dengan BUMN yang ada, dengan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memastikan energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 persen. PLN akan menyumbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan.

Selain itu, pihaknya juga akan memahami visi dan misi presiden untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sinergi antara BUMN. "Kami siap menjalankan agenda presiden sehingga mendukung perkembangan," ujar Darmawan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir di kantor BPI Danantara pada Rabu siang. Kepala BPI Danantara Mulyana Darmayana bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero).

Adapun Kamis depan, BPI Danantara dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merujuk data media presentasi, pada tahap awal, BPI Danantara akan mengunjungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharudin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci utama yang perlu di-

wujudkan, yaitu sinergi. "Terdapat sinergi antara BUMN yang optimal, yaitu Allah bisa luar biasa ke depan," ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN mempunyai baik sinergi dengan BUMN yang ada, dengan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memastikan energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 persen. PLN akan menyumbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan.

Selain itu, pihaknya juga akan memahami visi dan misi presiden untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sinergi antara BUMN. "Kami siap menjalankan agenda presiden sehingga mendukung perkembangan," ujar Darmawan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir di kantor BPI Danantara pada Rabu siang. Kepala BPI Danantara Mulyana Darmayana bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero).

Adapun Kamis depan, BPI Danantara dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merujuk data media presentasi, pada tahap awal, BPI Danantara akan mengunjungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharudin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci utama yang perlu di-

wujudkan, yaitu sinergi. "Terdapat sinergi antara BUMN yang optimal, yaitu Allah bisa luar biasa ke depan," ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN mempunyai baik sinergi dengan BUMN yang ada, dengan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memastikan energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 persen. PLN akan menyumbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan.

Selain itu, pihaknya juga akan memahami visi dan misi presiden untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sinergi antara BUMN. "Kami siap menjalankan agenda presiden sehingga mendukung perkembangan," ujar Darmawan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir di kantor BPI Danantara pada Rabu siang. Kepala BPI Danantara Mulyana Darmayana bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero).

Adapun Kamis depan, BPI Danantara dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merujuk data media presentasi, pada tahap awal, BPI Danantara akan mengunjungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharudin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci utama yang perlu di-

Wibawa Pemerintah Tergerus oleh "Tax Amnesty"

Pengampunan terlalu sering memicu keraguan pada kredibilitas pemerintah. Nuansa ketidakadilan menguat pada rencana pengampunan jilid baru.

Agnes Theodora

Rencana pengampunan pajak lanjutan bisa menggerus wibawa dan kredibilitas pemerintah. Program sejenis di masa lalu gagal menaikkan rasio pajak.

"Idealnya rasio pajak kita setelah program pengampunan pajak itu seharusnya bisa naik ke 16 persen. Sekarang rasio pajak kita hanya 10,37 persen," kata ekonom Bright Institute Awali Hidayat saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat pemerintahan Joko Widodo menginisiasi program pengampunan pajak jilid I pada 2016-2017, rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) terhadap produk domestik bruto (PDG) justru turun dari 10,76 persen pada 2015 menjadi 10,37 persen pada 2016 dan semakin menurun ke 9,99 persen pada 2017.

Pada 2018, rasio pajak sedikit meningkat menjadi 10,24 persen, lalu anjak kembali ke 9,76 persen pada 2019. Pada 2020 dan 2021 karena dampak pandemi Covid-19, rasio pajak RI merosot lagi menjadi 8,33 persen dan 9,23 persen.

Selanjutnya, program pengampunan pajak dan kebijakan lainnya yang dinilai kurang efektif menggerakkan rasio pajak Indonesia. Rasio pajak masih saja tertinggal di kisaran 10 persen.

Gerus Wibawa

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf mengatakan, program pengampunan pajak yang terlalu sering dilakukan akan mengurangi risiko moral.

Wibawa dan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak akan tergerus.

"Tapi, sebaliknya, Pemerintah jadi tidak kredibel kalau *tax amnesty* keseringan. Malah bisa jadi *tax amnesty* terakhir. 'Jangan sampai malah program ini memukul efisiensi dan efektivitas dari pengampunan pajak. Kredibilitas otoritas pajak harus benar-benar dijaga, harus dipastikan bahwa pengampunan yang diberikan ini untuk jangka panjang bisa membuat sistem pajak kita lebih baik' kata Arief.

Saat ini RUU Pengampunan Pajak sudah resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut diajukan oleh Komisi XI DPR dan turut disetujui oleh pemerintah dalam rapat Badan Legislasi (Badan Legi) DPR. Menurut rencana, RUU Pengampunan Pajak akan dibahas tahun depan.

Wakil Ketua Komisi XI M Hachul mengatakan, usulan itu diajukan Komisi XI untuk membantu pemerintah mencari sumber dana baru guna membiayai pembangunan. Selain itu, juga untuk membantu pemerintah membiayai program-program Pak Prabowo," katanya.

Bangun kapasitas

Awali mengatakan, saat program pengampunan pajak jilid I, tujuan utama pemerintah adalah membangun kapasitas penerimaan pajak jangka menengah dan panjang. Pada *tax amnesty* I, momentumnya masih tepat.

"Waktu itu pemerintahan baru dan sudah lama juga *tax amnesty* tidak dilakukan (se-

belumnya pada 2008). Program *tax amnesty* jilid I ini cukup banyak membantu dari sisi pengalihan potensi pajak dari *tax ratio* yang masih kecil," katanya.

Sementara itu, pada program jilid II alias PPS, menurut Awali, pemerintah hanya mengejar perubahan pembayarannya dengan tujuan "jalan pin-tas" menggerakkan penerimaan negara, tanpa melakukan perbaikan kapasitas penerimaan pajak dari hasil pengalihan pajak. Hasilnya pun tidak terlalu besar.

Berkecukupan pengalaman program *tax amnesty* yang sudah ada, ini berarti, pengampunan pajak yang akan mulai diujicobakan pada 2025 tidak akan efektif menggerakkan dana devisa.

"Ditambah jarkanya yang baru tiga tahun dari *tax amnesty* terakhir di 2022, nuansa ketidakadilan ini semakin kuat. Selain terkesan hanya untuk mencari dana instan bagi APBN, bisa saja hal itu juga dipakai untuk memberi jalan kepada pihak tertentu agar bisa meyakinkan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan," ucap Awali.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjat Wibisono mengatakan, agar lebih efektif, *tax amnesty* ke depan perlu membenarkan pada tiga hal, yaitu pendekatan yang lebih persuasif, desain kebijakan yang lebih tepat, serta tarif yang wajar dan adil.

"Pendekatan yang lebih persuasif diperlukan karena masih banyak pajak yang tidak dilaporkan. Selain itu, tarif *tax amnesty* juga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang lebih tepat, serta tarif yang wajar dan adil. Pendekatan yang lebih persuasif diperlukan karena masih banyak pajak yang tidak dilaporkan. Selain itu, tarif *tax amnesty* juga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang lebih tepat, serta tarif yang wajar dan adil."

KETENAGAKERJAAN

Penetapan Upah Minimum Tunggu Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sinyal penyesuaian rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum 2025 dalam rangkai pertemuan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Rabu (20/11/2024). Menteri Ketenagakerjaan (Permennaker) saat ini, Purnomo Djojo, mengatakan, pembahasan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional juga diharapkan tuntas pekan ini. Ke-betulan, Presiden Prabowo Subianto akan pulang" kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sesuai pertemuan dengan perwakilan buruh anggota Konfederasi Kongres Alansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBBI), Rabu (20/11/2024), di Jakarta.

Menurut dia, setelah mendengar arahan Presiden, Penaker bisa bisa dike-luarkan. Selanjutnya, bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemaker akan menyosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pengumuman penetapan upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan Desember 2024. Kami mengajjar sebelum Januari 2025. Kemudian, secara bertahap dilakukan pengumuman penetapan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral," kata Yassierli.

Yassierli memberi sinyal, pengumuman upah minimum 2025 kemungkinan tidak akan memukul formula yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun

2023 tentang Pengupahan. Hal itu disebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan sebagian pasal yang mengatur formula penghitungan upah minimum.

Kalau rumus lama masih dipakai, maka variabel indeks tertentu yang dimasukkan dalam rumus MK mungkin itu akan menjadi masalah," kata Yassierli.

Sebelumnya, sesuai PP No 51/2023, formula penghitungan upah minimum adalah $UM = (0,1 + 0,9 \times \text{Nilai Penyesuaian UMP}) \times (1 + \text{Inflasi} + \text{OP} \times \text{X}) \times \text{UM0}$. Simbol X yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Sesuai amar putusan MK, rumus baru 2025 masih bisa menggunakan rumus yang sama, namun dengan menggunakan indeks tertentu sesuai PP No 51/2023.

"Semestinya, pemerintah ikut mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan da-

yang sedang industri pada karya. Sektor padat karya tidak layak dilewatkan sektor. Jangan sampai nanti, baik perusahaan maupun pekerja jadi mengalami kerugian dari kebijakan pengupahan yang tidak berpihak pada sektor padat karya," kata Eddy.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbol Stegar berpendapat, tahun 2025 akan dilayangi inflasi yang kin besar. Pasalnya, Kementerian Keuangan bersikap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen berlaku tahun 2025.

"Harus diperhitungkan juga efek perang terhadap harga barang," ucapnya.

Timbol memandang, apabila kenaikan upah minimum provinsi hanya naik 5-6 persen, upah yang diterima akan tetap tergerus inflasi, terutama inflasi pangan yang sudah mencapai 7-8 persen.

Kenaikan upah minimum yang ideal, lanjut dia, harus di atas inflasi supaya bisa mendorong daya beli. Jika kenaikan upah minimum sama dengan besaran inflasi, hal itu belum sepenuhnya mendorong daya beli.

"Tapi, dengan situasi ini, pemerintah semestinya mempertimbangkan memberikan stimulus terhadap pelaku industri, terutama sektor pertanian, subsidi upah (BSU), misalnya. Akan tetapi, RSU harus dibagikan dengan tidak memukul data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan karena pasti tidak tepat sasaran," katanya.

Stimulus lainnya adalah pemerintah menunda PPN 12 persen. Namun, opsi ini di-disampingkan Timbol tidak diambil pemerintah. (M3)

MONEY FEST x Career Day 2024

Free Registration: bit.ly/MONEYFEST2024

21-22 NOVEMBER 2024

UNIVERSITAS MUSTAMILIA HUSANTARA

INSPIRATIONAL TALKSHOW

KEVIN GANI • ANJAS HARADITA • JUMALDI DJALAPUTRA
DAN KERING • HANRY SOFRI PUTRANOR • MARLO ERNSTO
FAZLEACHA NIDYANARA • ANGGA DIMAS BASONGHO

MUSIC PERFORMANCE

Reality Club

DIKITA

CAREER DAY 50+ CORPORATION

TERSEDIA RATUNAN LOWONGAN
MAGANG & FULLTIME

Hosted by **Kontari 26**

Collaboration with **UMN**

Media Partner **KOMPAS**